

**NAGARI SAMBUNGO KECAMATAN SILAUT
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**LAPORAN
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN
NAGARI (LPPN)
AKHIR TAHUN ANGGARAN 2018**

TAHUN 2019



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirrobil'alamin, Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan Rahmad dan Hidayah-Nya, serta shalawat kepada Nabi Muhammad SAW sehingga kami dapat menyelesaikan Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2018.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) ini, merupakan bentuk tanggungjawab kami secara administrasi dalam menyelenggarakan Pemerintahan Nagari Sambungo selama satu tahun. Laporan ini merupakan bahan evaluasi dan tolak ukur dalam menentukan tindak lanjut Rencana Kegiatan bagi Nagari Sambungo khususnya dan pada umumnya sebagai bahan kebijakan Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan dalam menentukan program dan kegiatan pada Tahun Anggaran berikutnya.

Kami mengucapkan terima kasih dan memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya terhadap semua pihak yang telah membantu, sehingga proses pembuatan dan Pelaksanaan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Wali Nagari Sambungo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir ini dapat kami selesaikan tepat pada waktunya.

Kami menyadari bahwa, dalam Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) yang kami sampaikan masih jauh dari sempurna, oleh karena itu kami membutuhkan koreksi, arahan, masukan yang dapat membimbing kami pada perubahan yang positif dalam penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan pelayanan terhadap masyarakat, menuju Nagari Sambungo yang mandiri.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Tujuan Penyusunan Laporan	1
B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari.....	1
C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintah Nagari.....	2
D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari	4
BAB II PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN NAGARI	6
A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.....	6
B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan	7
C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan	11
D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat.....	12
E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.....	13
BAB III KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI.....	15
BAB IV PENUTUP.....	17
A. Kesimpulan	17
B. Ucapan Terimakasih	17
C. Saran	17

BAB I

PENDAHULUAN

A. Tujuan Penyusunan Laporan

Pelaporan merupakan salah satu mekanisme untuk mewujudkan dan menjamin akuntabilitas pengelolaan Keuangan Nagari, sebagaimana ditegaskan dalam asas Pengelolaan Keuangan Nagari (Asas Akuntabel). Hakikat dari pelaporan ini adalah Pengelolaan Keuangan Nagari dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek yaitu aspek hukum, administrasi, maupun moral. Pelaporan pengelolaan Keuangan Nagari menjadi kewajiban Pemerintah Nagari sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penyelenggaraan pemerintahan Nagari. Pelaporan sebagai salah satu alat pengendalian yang berfungsi untuk:

1. Mengetahui kemajuan pelaksanaan kegiatan, dan
2. Mengevaluasi berbagai aspek (hambatan, masalah, faktor-faktor berpengaruh, keberhasilan, dan sebagainya) terkait pelaksanaan kegiatan pemerintah Nagari.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) dimaksudkan agar kebijakan Pemerintah Nagari Sambungo menjadi lebih terarah dan runtut sehingga semua yang dilakukan Pemerintah Nagari Sambungo dalam akhir tahun bisa dilaporkan kepada Bupati Kabupaten Pesisir Selatan melalui Camat Silaut.

Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN), merupakan Penjabaran Kinerja Pemerintah Nagari selama periode 1 (satu) tahun yang memuat Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pelaksanaan Pembangunan Nagari, Pembinaan Kemasyarakatan Nagari, dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari dan sekaligus melaporkan capaian kegiatan pembangunan yang telah dilaksanakan selama 1 (satu) tahun, prestasi yang dicapai, dan pelaksanaan pengelolaan keuangan Nagari dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Nagari (RKP Nagari) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari (RPJM Nagari).

B. Visi dan Misi Pemerintahan Nagari

Untuk mewujudkan pemerintahan Nagari yang berkualitas dan profesional dalam melaksanakan tugas dan fungsinya maka Pemerintahan Nagari harus memiliki Visi dan Misi. Adapun Visi dan Misi Pemerintahan Nagari Sambungo sebagai berikut :

a. **Visi** : “ Terwujudnya Nagari yang maju dengan didukung oleh kebersamaan untuk kesejahteraan masyarakat “

b. **Misi Nagari** :

Dalam meraih Visi tersebut, dengan mempertimbangkan potensi dan hambatan baik secara internal maupun eksternal. Maka dijabarkan dalam Misi, antara lain :

1. Membangun sebuah sistem pemerintahan yang profesional, efektif dan efisien;
2. Membangun Solidaritas dan kebersamaan antar tokoh masyarakat dan semua komponen masyarakat;
3. Mengutamakan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan dan tempat tinggal;
4. Peningkatan peran generasi muda dan perempuan (persamaan gender) dalam menunjang bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat;
5. Peningkatan pembangunan Infrastruktur dasar untuk kesejahteraan masyarakat berazaskan mufakat;
6. Peningkatan sumber-sumber ekonomi masyarakat, seperti pengembangan kelompok-kelompok usaha kecil yang bersinergi dengan Bumrag;
7. Pengembangan potensi wisata melalui Bumrag yang bekerjasama dengan pihak-pihak terkait;
8. Peningkatan dan pengembangan dibidang perkebunan, peternakan dan perikanan baik sarana maupun prasarana untuk menunjang kesejahteraan masyarakat;
9. Memaksimalkan sumber dana yang telah diberikan oleh pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat melalui program Padat Karya Tunai, sehingga akan terciptanya sebuah lapangan pekerjaan bagi masyarakat dan meningkatnya perekonomian masyarakat di Nagari;
10. Mendukung program pemerintah dalam mensukseskan pembangunan nasional mulai dari Nagari.

C. Strategi dan Arah Kebijakan Pemerintahan Nagari

Program ADD (Alokasi Dana Desa) yang mulai dilaksanakan sejak 2006 dan program DD (Dana Desa) yang dimulai sejak tahun 2015 merupakan permulaan baru bagi desa dalam menjalankan dan mendukung program kerja pemerintah. Dana ADD sangat mendukung dalam upaya pembiayaan bidang administrasi desa sedangkan dana DD sangat berperan dalam pembangunan dan pemberdayaan Masyarakat desa.

Salah satu strategi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo selalu diawali dengan Musyawarah Nagari yang dihadiri oleh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh Agama, Pemerintah Nagari beserta BAMUS dalam rangka penggalian gagasan.

Sebelum dilakukan musyawarah perencanaan pembangunan desa, terlebih dahulu akan dilaksanakan musyawarah ditingkat Kampung atau biasa disebut dengan musyawarah penggalian gagasan. Kepala kampung menyampaikan saran maupun kritik tentang penyelenggaraan pemerintahan Nagari maupun pembangunan Nagari yang didapat dari masyarakat nya. Dari penggalian gagasan tersebut, dapat diketahui permasalahan yang ada di Nagari dan dapat disimpulkan kebutuhan apa saja yang diperlukan oleh masyarakat. Dengan adanya kegiatan tersebut, aspirasi seluruh lapisan masyarakat bisa tertampung.

Selanjutnya beberapa gagasan tersebut dicatat dan dibuat draft nya oleh Tim Penyusun RKP. Sebagai tim penyusun, harus berperan aktif membantu Pemerintah Nagari dalam membahas dan menyepakati proses pembangunan yang ada di Nagari.

Tidak hanya menyepakati proses pembangunan, tim penyusun RKP, Pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus membahas dan menyepakati penyelenggaraan pemerintahan di Nagari, pemberdayaan masyarakat di Nagari, partisipasi masyarakat, siltap Wali Nagari dan perangkat, operasional Pemerintahan Nagari, tunjangan operasional BAMUS, dan Intensif Guru Paud/TK, TPA dan para Kader-kader yandu. Dalam hal ini proses penyusunan harus dilakukan dengan segera dalam arti menyusun skala prioritas. Dalam hal ini Tim RKP, pemerintah Nagari beserta BAMUS juga harus ikut serta dalam membahas dan menyepakati program proses pembangunan di Nagari.

Kemudian Gagasan-Gagasan mengenai pembangunan di Nagari yang telah dibuat dalam bentuk draf oleh tim RKP, diverifikasi oleh Tim Verifikasi kegiatan baru selanjutnya akan dimusyawarahkan ditingkat Nagari atau yang biasa disebut dengan MusrenbangNag. MusrenbangNag ini kemudian menghasilkan beberapa jenis kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan oleh Nagari dari dana APBNag, Pemerintah kabupaten dari APBD Kabupaten, Pemerintah Provinsi dari APBD Propinsi, atau Pemerintah pusat dari dana APBN. Hasil MUSRENBANG NAG dibagi 2 (dua) kegiatan, yaitu ;

- Rencana Pembangunan Jangka Menengah
- Rencana Kerja Pembangunan Tahunan

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah merupakan perencanaan penting untuk kegiatan strategis Nagari dalam melaksanakan kegiatan pembangunan selama 5 (lima) tahun kedepan yang mengacu pada APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan APBNag. Prioritas pembangunan Jangka Menengah Nagari Sambungo periode tahun 2018 sampai dengan 2023 dibagi menjadi empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

2. Rencana Pembangunan Tahunan

Rencana Kerja Tahunan Nagari merupakan Rencana Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan dalam jangka waktu pendek atau bersifat tahunan yang kegiatannya berdasarkan APBNag yang telah disetujui oleh BAMUS dan disahkan oleh Kabag Hukum Kabupaten untuk dikerjakan pada tahun anggaran tersebut yang didanai oleh Nagari dengan dana PAD, ADD, DD dan dana lainnya yang sah. Kegiatan ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah yang kegiatannya per tahun, kegiatan yang dilaksanakan Pembangunan Jangka Pendek terdiri dari empat bidang yaitu, bidang penyelenggaraan pemerintahan Nagari, bidang pembinaan masyarakat Nagari, bidang pelaksanaan pembangunan Nagari, dan bidang pemberdayaan masyarakat.

D. Arah Kebijakan Pembangunan Nagari

a. Arah Pengelolaan Pendapatan Nagari

1. Pendapatan Nagari bersumber APB Des dan Dana dari Pemerintah.
2. Pendapatan Asli Nagari dipungut berdasarkan aturan yang berlaku
3. Pendapatan dari APB Des dan dari Pemerintah dikelola oleh bendahara Nagari.

b. Arah Pengelolaan Belanja Nagari

Belanja Nagari Sambungo terdiri dari sumber Pendapatan Asli Nagari dan Alokasi Dana Desa yang bersumber dari Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, serta Dana Desa yang

bersumber dari Pemerintah Pusat. dipergunakan untuk belanja dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari, Pembangunan Nagari, Pembinaan Masyarakat dan Pemberdayaan Masyarakat Nagari, sebagai berikut :

1. Belanja Siltap Wali Nagari Dan Perangkat Nagari
2. Belanja Tunjangan Wali Nagari Dan Perangkat Nagari
3. Tunjangan Operasional BAMUS
4. Program Operasional Pemerintahan Nagari
5. Program Pelayanan Dasar
6. Program Pelayanan Dasar Infrastruktur
7. Program Pelayanan Dasar Pendidikan
8. Program Pelayanan Kesehatan
9. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari
10. Program Pemberdayaan Masyarakat Nagari
11. Program Ekonomi Produktif
12. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur Nagari
13. Program Penunjang Peringatan Hari-Hari Besar

BAB II

LAPORAN PENYELENGGARAAN

PEMERINTAHAN NAGARI

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari ialah Uraian tentang Rencana dan Pelaksanaan Program Kerja Bidang Pemerintahan Nagari dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Nagari sesuai dengan kewenangan Nagari. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari diarahkan kepada terlaksananya tata kelola pemerintahan Nagari yang baik.

A. Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari

Adapun Rencana Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari berdasarkan RKP Nagari Tahun 2018 sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat
2. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
3. Tunjangan Kehormatan Bamus
4. Tunjangan program JKKK dan Purna Bakti Wali Nagari dan Perangkat
5. Insentif Wali Nagari
6. Operasional Perkantoran
7. Operasional Bamus Nagari
8. Operasional Pemungkutan PBB
9. Operasional Raskin
10. Pengelolaan Informasi Nagari
11. Pemilihan Wali Nagari
12. Pelantikan Wali Nagari
13. Musyawarah Nagari
14. Musrembang Nagari
15. Biaya Tak Terduga
16. Rapat Tim Penyusun RKP
17. Kegiatan Verifikasi
18. Kegiatan Perencanaan
19. Belanja Modal Peralatan Kantor

20. Bulan Bakti Gotong Royong
21. Pengadaan Aset Nagari
22. Pembangunan Pagar Kantor
23. Pembangunan Pustaka Nagari

Program Kerja Penyelenggaraan Pemerintah Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Penghasilan tetap Wali Nagari dan Perangkat
2. Tunjangan Wali Nagari dan Perangkat
3. Tunjangan Kehormatan Bamus
4. Tunjangan Program JKKK dan Purna Bakti Wali Nagari dan Perangkat
5. Operasional Perkantoran
6. Operasional Bamus Nagari
7. Operasional Pemungutan PBB
8. Operasional Raskin
9. Pengelolaan Informasi Nagari
10. Pemilihan Wali Nagari
11. Pelantikan Wali Nagari
12. Musyawarah Nagari
13. Musrembang Nagari
14. Biaya Tak Terduga
15. Rapat Tim Penyusun RKP
16. Kegiatan Verifikasi
17. Kegiatan Perencanaan
18. Belanja Modal Peralatan Kantor
19. Bulan Bakti Gotong Royong
20. Pengadaan Aset Nagari

B. Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan

Adapun Rencana Program Kerja Pelaksanaan Pembangunan Nagari berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Gang Jalur 1 Kp. Silaut VI
2. Pengerasan Jalan Gang Jalur 07 Kp. Silaut VI (Lanjutan)

3. Pengerasan Jalan Gang Jalur 09 Kp. Tanjung Sari
4. Pengerasan Jalan Gang Jalur 12 Kp. Tanjung Sari
5. Pengerasan Jalan Gang Jalur 13 Kp. Tanjung Sari
6. Pengerasan Jalan Kampung Silaut VI
7. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Sambungo
8. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Sambungo
9. Pembangunan Jembatan Jalan Gang Jalur 04 Kp. Silau VI
10. Pembangunan Jembatan Jalan Gang Jalur 05 Kp. Silau VI
11. Pembangunan Jembatan Jalan Gang Jalur 12 Kp. Silau VI
12. Pembangunan Jembatan Jalan Gang Jalur 09 Kp. Tanjung Sari
13. Pembangunan Jembatan Jalan Gang Jalur 10 Kp. Tanjung Sari
14. Usaha Tani Jalur 04 Kp. Silaut VI
15. Usaha Tani Jalur 06 Kp. Silaut VI
16. Usaha Tani Jalur 08 Kp. Tanjung Sari
17. Usaha Tani Jalur 10 Kp. Tanjung Sari
18. Usaha Tani Jalur 12 Kp. Tanjung Sari
19. Pembangunan Siring
20. Pembangunan Babak Beton
21. Lanjutan Pembangunan Serba Guna
22. Penimbunan Fasilitas Umum
23. Pengadaan Alat Sarana dan Prasarana Olahraga
24. Pembangunan Jembatan TK/PAUD
25. Pembangunan Jemabatan Gedung Serba Guna
26. Pembangunan Jemabatan Kp. Sambungo
27. Tenda Pesta
28. Tanaman Penghijau Jalan
29. Draenase Lingkungan Kp. Silaut VI dan Kp. Tanjung Sari
30. Pengeringan Lahan Usaha Tani 1 Kp. Silaut VI
31. Pengeringan Saluran Draenase Kp. Sambungo
32. Pembangunan Jalan Usaha Tani
33. Pembangunan Jalan Usaha Tani
34. Gapura Selamat Datang
35. Gapura Kp. Sambungo

36. Gapura Silaut VI dan Kp. Tanjung Sari
37. Kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Ternak Sapi dan Terintegrasi dengan Kelapa Sawit
38. Bantuan Pembangunan Air Bersih
39. Pembangunan Gedung Posyandu Kp. Silaut VI
40. Pembangunan Gedung Poyandu Kp. Tanjung Sari
41. Pembangunan Gedung Poyandu Sambungo
42. Pembangunan Pos Ronda Kp. Silaut VI
43. Pembangunan Pos Ronda Kp. Tanjung Sari
44. Pembangunan Pos Ronda Kp. Sambungo
45. Pengelolaan Tanah Kas Desa (TKD) Menjadi Perkebunan Milik BUMNAG
46. Pembangunan dan Pengadaan Sarana informasi dan Komunikasi
47. Lanjutan Pembangunan Gedung TK/PAUD
48. Pembangunan MCK Pinggir Pantai Sambungo
49. Pembangunan Gotong Royong pada Jalan Usaha Tani
50. Pembangunan Gedung MDA
51. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Silaut VI
52. Pembangunan Jalan Usaha Tani Kp. Tanjung Sari
53. Pengeringan Saluran Draenase Priemer dan Sekunder pada Lahan Usaha II
54. Pembangunan Sarana Evakuasi Stunami/Shelter
55. Pembangunan Jalan dan Jembatan Penghubung Nagari Sambungo dengan Air Hitam
56. Pembangunan Tanggul Pemecah Ombak
57. Pembangunan Sarana dan Prasarana Wisata Pantai
58. Pemasangan Lampu Penerangan Jalan
59. Pembangunan Lapangan Bola Kaki dan Tribun Mini
60. Pembangunan RUBELMAS
61. Pembangunan Pelabuhan/Dermaga Kapal Mini
62. Pengadaan Koompor GAS Elpiji 3 kg
63. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
64. Pembangunan MCK setiap Kampung
65. Pengaadaan Mobil Ambulance
66. Pembangunan Pagar Pondok Pesantren

67. Pembangunan Aula Pondok Pesantren
68. Pembangunan Asrama Putra dan Putri Pondok Pesantren
69. Pembangunan Pagar SPMN 4 Silaut
70. Pengadaan Peralatan Drum Band/Marching Band SMPN 4 Silaut
71. Pembangunan Runag Kelas SMPN 4 Silaut
72. Pembangunan MCK SMPN 4 Silaut
73. Pembangunan Tempat Parkir Kendaraan SMPN 4 Silaut
74. Pembangunan Pagar SDN 11 Silaut
75. Pembangunan Perpustakaan SDN 11 Silaut
76. Pembangunan Saran Olahraga SDN 11 Silaut
77. Pembangunan Sarana Pemancingan Umum
78. Kegiatan Pengadaan Bibit Sapi Unggul
79. Kegiatan Pengadaan Bibit Ikan Air Tawar
80. Pembangunan dan Rehap Masjid dan Mushola
81. Pengadaan Peralatan, Penangkapan Ikan Laut, Kapal, Mesin dan lainnya
82. Pengadaan Itik Petelur
83. Pengerasan Jalan Kampung Silaut VI
84. Pembangunan Lapangan Bola Volli
85. Pengerasan Jalan Gang Jalur 4 Kp. Sambungo
86. Pembangunan Talut Jalan Lintas KTM Lusi-Pantai Sambungo
87. Rehabilitasi Sarana Air Bersih
88. Kelanjutan Pembangunan KTM Lunang Silaut
89. Pembangunan Kawasan Desa Wisata
90. Pengadaan Peralatan Teknologi Tepat Guna
91. Lanjutan Pengadaan Bantuan Raskin
92. Bantuan Jaminan Kesehatan Masyarakat

Program Kerja Pembangunan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Pembangunan Jalan Gang Jalur 1 Kp. Silaut VI
2. Pengerasan Jalan Gang Jalur 09 Kp. Tanjung Sari
3. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Sambungo
4. Pengerasan Jalan Usaha Tani Kp. Sambungo
5. Lanjutan Pembangunan Serba Guna

6. Pembangunan Jembatan Gedung Serba Guna
7. Kegiatan Pengembangan Kawasan Berbasis Ternak Sapi dan Terintegrasi dengan Kelapa Sawit
8. Bantuan Pembangunan Air Bersih
9. Pembangunan Pos Ronda Kp. Silaut VI
10. Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni
11. Pembangunan MCK setiap Kampung
12. Lanjutan Pengadaan Bantuan Raskin

C. Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan

Adapun Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan TPA/TPSA
2. Kegiatan Pembinaan Majelis Taqlim
3. Honor Guru TK dan PAUD
4. Kegiatan Didikan Subuh
5. Kegiatan Arisan Turnamen Olahraga se-Kecamatan
6. LPMN
7. Kegiatan Honor Kader Kebersihan
8. Kegiatan Honor Kader KB
9. Kegiatan Honor Kader Yandu
10. Kegiatan Honor Kader PTM
11. Kegiatan Honor Kader Lansia
12. Kegiatan Honor Kader Pos Bindu
13. Kegiatan Honor Kader Sub PPKBD
14. Kegiatan Lembaga Kepemudaan
15. Kegiatan PHBN
16. Kegiatan TP-PKK Nagari

Program Kerja Pembinaan Kemasyarakatan Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Kegiatan Pembinaan TPA/TPSA

2. Kegiatan Pembinaan Majelis Taqlim
3. Honor Guru TK dan PAUD
4. Kegiatan Didikan Subuh
5. LPMN
6. Kegiatan Honor Kader KB
7. Kegiatan Honor Kader Yandu
8. Kegiatan Honor Kader Lansia
9. Kegiatan Honor Kader Sub PPKBD
10. Kegiatan PHBN
11. Kegiatan TP-PKK Nagari

D. Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat

Adapun Rencana Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. BUMNAG
2. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, BAMUS dan Perangkat Nagari
3. Study Koperatif Wali Nagari, Bamus dan Perangkat Nagari
4. Kegiatan Kerja Sama Nagari dengan NDC UNAND
5. Bulan Bakti Gotong Royong
6. Pelatihan Keterampilan Usaha
7. Pelatihan/Pengadaan Barang di Bidang Keagamaan
8. Pelatihan Sanggar Seni/Pengadaan Barang di Bidang Seni Budaya Tradisional
9. Pelatihan BAMUS
10. Pelatihan Menjahit
11. Validasi Profil Nagari
12. Kegiatan PMT untuk Balita
13. Kegiatan PMT untuk Lansia
14. Kegiatan Pencegahan Perkembangan Penyakit DBD
15. Pelatihan LPMN
16. Kegiatan Pelatihan dan Sosialisasi Adat Budaya
17. Kegiatan Pelatihan Olahraga Bola Kaki dan Bola Voli
18. Kegiatan Bantuan Modal Kelompok Mikro Nagari

19. Kegiatan Bantuan Modal UEP PKK Nagari
20. Pelatihan Pengelolaan Pupuk Organik
21. Pelatihan Pengelolaan Keramba Ikan
22. Pelatihan Pembuatan Biogas
23. Pelatihan Penanggulangan Bencana Alam
24. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

Program Kerja Pemberdayaan Masyarakat Nagari yang dilaksanakan berdasarkan RKP Nagari sebagai berikut :

1. Peningkatan Kapasitas Wali Nagari, BAMUS dan Perangkat Nagari
2. Kegiatan Kerja Sama Nagari dengan NDC UNAND
3. Bulan Bakti Gotong Royong
4. Pelatihan/Pengadaan Barang di Bidang Keagamaan
5. Pelatihan Menjahit
6. Validasi Profil Nagari
7. Kegiatan PMT untuk Balita
8. Kegiatan PMT untuk Lansia
9. Kegiatan Pencegahan Perkembangan Penyakit DBD
10. Pelatihan Teknologi Tepat Guna

E. Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari

1. Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan Belanja Nagari (APB Nagari) Tahun Anggaran 2018.

Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari telah ditetapkan dengan Peraturan Nagari Nagari Sambungo Nomor 3 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2018. dan Peraturan Nagari Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Nagari Sambungo Tahun Anggaran 2018, dengan rincian *terlampir pada format A.1*

Rincian Anggaran pendapatan dan belanja Nagari Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut :

1 Pendapatan Nagari	1.160.008.624,00	
2. Belanja Nagari	1.158.671.981,37	
2.a. Bid. Penyelenggaraan Pemerintah	427.393.066,46	
2.b. Bid. Pembangunan	509.088.600,00	Peraturan Nagari
2.c. Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	215.860.314,,91	Tentang
2.d Bid. Pemberdayaan Kemasyarakatan	215.860.314,91	Pertanggung
		jawaban
Jumlah Belanja	1.158.671.981,37	Pelaksanaan
Surplus/Defisit	1.336.642,63	Anggran Pendapatan
3. Pembiayaan Nagari		dan Belanja Tahun
3.a. Penerimaan Pembiayaan	13.663.357,37	Anggaran 2018.
3.b. Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
Jumlah pembiayaan Nagari	(1.336.642,63)	
Sisa lebih/ (Kurang) Perhitungan Anggaran	0,00	

Peraturan Nagari Sambungo Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun 2018, *dengan rincian terlampir pada format B.*

BAB III

KEBERHASILAN, PERMASALAHAN DAN SOLUSI

Di samping keberhasilan dan prestasi yang dicapai Pemerintah Nagari Sambungo, tentu juga masih terdapat permasalahan yang dihadapi diantaranya masalah pembangunan dan SDM, baik SDM Pemerintah Nagari, Lembaga Nagari, maupun warga Nagari Sambungo secara umum. Adapun keberhasilan dan permasalahan serta solusi yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan di Nagari Sambungo, dapat diurai dalam tabel dibawah ini :

NO	BIDANG	KEBERHASILAN YANG DICAPAI	PERMASALAHAN YANG DIHADAPI	SOLUSI/ UPAYA YANG DITEMPUH
1.	Pelaksanaan Pemerintah Nagari	1 Pengelolaan dan penatausahaan administrasi Nagari 2 Peningkatan Realisasi PBB 3 Penataan rencana pembangunan Nagari	Kurangnya Skill (Pengetahuan) Aparat Nagari Ada sebagian Objek (wajib Pajak) Yang tidak jelas	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan Pentingnya sosialisasi dalam pembayaran PBB
2	Pelaksanaan Pembangunan	1 Tersedianya sarana air bersih bagi masyarakat 2 Tersediannya Pusat Kesehatan Masyarakat. Tersedianya Sarana Fisik Gedung Sarana Rumah Tidak Layak Huni	Masih Kurangnya kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan sarana air bersih Kinerja pengelola sarana air bersih belum maksimal Masih Minimnya sarana prasarana kesehatan. terbatasnya anggaran kegiatan yang diperuntukkan untuk kegiatan RTLH	Menertibkan petugas air bersih secara maksimal Perlu revitalisasi pengurus sarana air bersih Perlu upaya terobasan untuk mendapatkan fasilitas kesehatan Mengupayakan pengajuan keinstansi yang berwenang, perkimtan dan Baznas Kab.

3.	Pembinaan Kemasyarakatan	1 Penataan Pos keamanan	Pemanfaatan Sarana Pos keamanan yang belum maksimal	Penertiban pemaanfaat Pos kemanan.
		2 Terciptanya keindahan dan kebersihan lingkungan	Kurangnya kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan	Sosialisasi kebersihan lingkungan dari pemerintah Nagari
		3 Meningkatnya pemahaman agama		
		4 Terwujudnya santri dan santriwati yang mahir dalam baca Tulis Al-Quran	Kurangnya tenaga ahli (Hafidz) dalam membina baca tulis Alquran	Mendatangkan tenaga ahli (Hafidz)
		5 Meningkatnya kesejahteraan kader posyandu	Kurangnya pembinaan kader Posyandu	Mengadakan pelatihan dan pembinaan kader
		6 Terciptanya (SDM) Perangkat Nagari dalam mengelola keuangan Nagari berbasis Siskeudes	Kurangnya perhatian perangkat Nagari dalam mengembangkan SDM secara berkelanjutan	Membutuhkan pembinaan secara berkelanjutan
4.	Pemberdayaan Masyarakat	1 Terwujudnya keindahan dan kebersihan kantor	Petugas kebersihan masih perlu pembinaan dalam kesadaran kebersihan kantor	Pembinaan dan perhatian khusus petugas kebersihan kantor
		2 Ditetapkannya pengurus Bumdes/Bumnag yang baru	pengurus Bumdes/Bumnag baru masih membutuhkan data dan informasi dari pengurus kegiatan yang ada	Mengadakan pertemuan pengurus Bumdes lama dan pengurus Bumdes Baru
		3 Peningkatan SDM melalui pelatihan	Kurangnya pemahaman materi pelatihan peningktan SDM	Membutuhkan pelatihan peningkatan yang berlanjut

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Mengacu pada Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari/ Wali Nagari, pada pasal 3 poin 1 *“Laporan penyelenggaraan pemerintah Nagari Akhir Tahun Anggaran disampaikan oleh Kepala Nagari kepada Bupati/walikota melalui camat secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran”*.

Demikianlah Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari (LPPN) Pemerintah Nagari Sambungoo Kecamatan Silaut Kabupaten Pesisir Selatan kami buat dengan sebenar-benarnya. Pada intinya, Pemerintah Nagari Sambungo sudah berusaha melaksanakan kegiatan pemerintahan Nagari dengan sebaik-baiknya, baik Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan, Bidang Pelaksanaan Pembangunan, Bidang Pembinaan Kemasyarakatan, maupun Bidang Pemberdayaan Masyarakat.

Kami menyadari bahwa dalam penyampaian dan penulisan laporan ini masih terdapat banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, kami mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan dimasa yang akan datang.

B. Ucapan Terimakasih

Selanjutnya kami atas nama Pemerintahan Nagari Sambungo mengucapkan terimakasih kepada seluruh lembaga-lembaga Pemerintahan Nagari, seluruh Masyarakat Nagari Nagari Sambungo, atas dukungan dan bantuan baik materi maupun tenaga atas keberhasilan kegiatan-kegiatan yang telah tercapai dalam Pemerintahan Nagari. Terimakasih kepada semua pihak atau stake holder yang tidak bisa disebutkan satu persatu atas jasa-jasa dan perjuangannya, serta mohon dukungan dan kerjasamanya untuk tahun-tahun mendatang.

C. Saran

Demi kelancaran Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Nagari sebagaimana diatur Permendagri Nomor 46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Nagari/ WaliNagari, maka kami dari pemerintah Nagari menyarankan agar Kabupaten/Dinas terkait untuk

meningkatkan kapasitas Aparat Nagari, terkhusus Pengelola Keuangan dan Tim Penyusun LPPN di Nagari.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari Akhir Tahun Anggaran 2018 ini dibuat dan disampaikan untuk dibahas dan dirumuskan dalam Keputusan BAMUS Nagari Nagari Sambungo yang berisi catatan ataupun rekomendasi untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun berikutnya.